

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sekolah merupakan suatu lembaga pendidikan formal yang mempunyai tanggung jawab untuk mendidik peserta didiknya. Penyelenggaraan proses belajar mengajar di sekolah, direalisasikan dengan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Sistem pendidikan nasional menyebutkan “Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Konsep pendidikan yang dinilai baik dapat diaplikasikan untuk mengukur keberhasilan konsep pendidikan tersebut. Salah satu konsep pendidikan yang terdapat dalam kurikulum adalah pendidikan karakter. Pendidikan karakter mengajarkan kebiasaan cara berpikir dan berperilaku yang dapat membantu individu untuk hidup dan bekerja sama sebagai keluarga, masyarakat, dan bernegara. Salah satu mata pelajaran yang memuat tentang pendidikan karakter adalah mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu konsep pendidikan yang berfungsi untuk membentuk peserta didik sebagai warga negara yang mempunyai watak atau karakter. Kementerian Nasional telah merumuskan 18 karakter yang ditanamkan dalam diri peserta didik sebagai upaya membangun karakter bangsa. Nilai karakter bangsa tersebut yaitu: (1) Religius, (2) Jujur, (3) Toleransi, (4) Disiplin, (5) Kerja keras, (6) Kreatif, (7) Mandiri, (8) Demokrasi, (9) Rasa ingin tahu, (10) Semangat Kebangsaan, (11) Cinta tanah air, (12) Menghargai prestasi, (13) Komunikatif, (14) Cinta damai, (15) Gemar Membaca, (16) Peduli Lingkungan, (17) Peduli Sosial, dan (18) Tanggung Jawab. Salah satu nilai yang akan ditekankan adalah tentang disiplin.

Disiplin adalah tindakan yang menunjukkan perilaku tata tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Misalnya jika, seseorang mengikuti kegiatan belajar di sekolah tidak akan lepas dari berbagai peraturan dan tata tertib yang diberlakukan sekolah. Seluruh peserta didik dituntut untuk berperilaku sesuai aturan dan tata tertib yang berlaku. Kepatuhan dan ketaatan peserta didik terhadap berbagai aturan dan tata tertib sekolah disebut disiplin siswa. Sedangkan peraturan tata tertib dan berbagai ketentuan lain yang berupaya mengatur perilaku siswa disebut disiplin sekolah. (Depdiknas, 2010).

Menurut Hidayatullah (2014: 45), kedisiplinan menjadi alat yang ampuh dalam mendidik karakter. Banyak orang sukses karena menegakkan kedisiplinan. Sebaliknya, banyak upaya membangun sesuatu tidak berhasil karena kurang atau tidak disiplin. Banyak agenda yang telah ditetapkan tidak

dapat berjalan karena kurang disiplin. Kurangnya disiplin dapat berakibat melemahnya motivasi seseorang untuk melakukan sesuatu. Oleh karena itu, betapa pentingnya menegakkan disiplin agar sesuatu yang diinginkan dapat tercapai dengan tepat waktu. Dengan demikian, penegakan kedisiplinan merupakan salah satu strategi dalam membangun karakter seseorang. Jika penegakan disiplin dapat dilakukan secara berulang-ulang dan terus menerus, maka lama-kelamaan akan menjadi kebiasaan yang positif.

Kedisiplinan seseorang tidak tumbuh dengan sendirinya, diperlukan berbagai upaya pembinaan terhadap warga negara yang harus terus menerus dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan sehingga sesuai dengan tujuan yang diharapkan yaitu terbentuknya karakter kedisiplinan warga negara. Disiplin dapat tumbuh dan dibina melalui latihan, pendidikan atau penanaman kebiasaan yang harus dimulai sejak dalam lingkungan keluarga, mulai pada masa kanak-kanak dan terus tumbuh berkembang sehingga menjadi disiplin yang semakin kuat (Priodarminto, 2014: 24). Salah satu bentuk pembinaan terhadap sikap dan perilaku disiplin adalah melalui pendidikan di sekolah. Kedisiplinan di sekolah sangat diperlukan agar sekolah menjadi sebuah lembaga pembentukan diri yang andal. Tanpa ada nilai kedisiplinan, sekolah hanya akan menjadi tempat berseminya berbagai macam konflik sehingga kekacauan menjadi buah-buah yang tak terelakkan dari tindakan indisipliner tersebut (Doni Koesoema A, 2012: 233).

Disiplin sekolah merupakan usaha sekolah dalam memelihara perilaku peserta didik agar tidak menyimpang dan mendorong peserta didik untuk berperilaku sesuai norma, peraturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Penerapan tata tertib, aturan sekolah tentang berbagai tata laku yang mengatur hal seperti cara berpakaian, ketepatan waktu (masuk, istirahat dan pulang sekolah), perilaku sosial dan etika belajar dapat menciptakan kondisi disiplin sekolah. Disiplin di sekolah dapat juga dipahami sebagai upaya dalam

memberikan hukuman (sanksi ataupun poin) sebagai konsekuensi dari pelanggaran terhadap aturan. Ada tiga macam bentuk disiplin yaitu disiplin permisif dan demokratis, disiplin otoriter dan keras; dan disiplin situasional dan moderat Hurlock (dalam Wantah 2015:178). Disiplin sekolah biasanya adalah disiplin otoriter dan keras. Bentuk disiplin ini meninggikan agar anak patuh dengan aturan yang ditetapkan.

Guru merupakan salah satu komponen penting yang ada di sekolah. Guru memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam membentuk kepribadian anak, guna menyiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia, serta mensejahterakan masyarakat, kemajuan negara, dan bangsa (Mulyasa, 2011: 36). Guru Pendidikan Kewarganegaraan mempunyai peranan dan tanggung jawab yang sangat besar dalam upaya pembinaan sikap dan perilaku pelajar yang salah satunya meliputi sikap disiplin siswa. Karena Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945 (Permendiknas No. 22 Tahun 2006). Adapun tujuan Pendidikan Kewarganegaraan adalah membentuk warga negara yang lebih baik (*a good citizen*) dan mempersiapkannya untuk masa depan (Cholisin, 2004: 12).

Peran guru disini umumnya sangat diperlukan untuk mengantarkan pemahaman peserta didik akan sikap kedisiplinan. Pentingnya pembentukan

nilai disiplin bagi peserta didik diperlukan sebagai sebuah langkah yang baik sehingga dapat mencegah dalam melakukan pelanggaran atau perbuatan negatif. Pembiasaan disiplin bagi peserta didik memerlukan sebuah dorongan yang berfungsi sebagai motivasi yang berujung pada kesadaran peserta didik dalam meningkatkan kedisiplinan diri. Oleh karena itu, diperlukan upaya guru dalam membentuk disiplin peserta didiknya. Upaya guru tersebut dapat membuat peserta didik memiliki rasa tanggung jawab dan berusaha untuk meningkatkan kedisiplinan.

Dari hasil observasi awal lapangan yang dilakukan oleh peneliti di SMA N 1 Bukateja diketahui masih adanya siswa yang tidak disiplin. Misalnya terlambat datang ke sekolah, atribut tidak sesuai dengan ketentuan, baju tidak dimasukkan, tidak masuk ke sekolah tanpa keterangan atau membolos, dan lain-lain. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kedisiplinan siswa masih rendah. Diketahui pada periode Tahun Pelajaran 2015/2016 terjadi sebanyak 205 kasus atau pelanggaran. Kemudian pada Tahun Pelajaran 2016/2017 meningkat menjadi 237 kasus atau pelanggaran, dan pada Tahun Pelajaran 2017/2018 pelanggaran mencapai 316 kasus atau pelanggaran seperti yang tertera pada Tabel 1.1

Tabel 1 Perbandingan Jumlah Pelanggaran Terhadap Peraturan Sekolah Di SMA Negeri 1 Bukateja

| Jenis kasus/ Pelanggaran | Tahun Pelajaran | Tahun Pelajaran | Tahun Pelajaran |
|---|------------------|------------------|------------------|
| | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 |
| a. Tidak masuk sekolah tanpa keterangan/Bolos | a. 65 kasus | a. 57 kasus | a. 75 kasus |
| b. Terlambat | b. 50 kasus | b. 75 kasus | b. 94 kasus |
| c. Atribut tidak lengkap | c. 50 kasus | c. 60 kasus | c. 94 kasus |
| d. Perundungan/Bully | d. 40 kasus | d. 45 kasus | d. 53 kasus |
| Jumlah | 205 kasus | 237 kasus | 316 kasus |

Sumber: Data BP/BK SMA Negeri 1 Bukateja Tahun Pelajaran 2015-2018

Dari hasil kegiatan observasi awal, peneliti menemukan fakta bahwa guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam upaya membentuk kedisiplinan siswa di SMA Negeri 1 Bukateja belum berjalan efektif. Hal ini disebabkan karena guru Pendidikan Kewarganegaraan tersebut kurang berperan jauh dalam membentuk kedisiplinan siswa di sekolah. Guru Pendidikan Kewarganegaraan juga menemui kendala dalam membentuk kedisiplinan siswa di SMA Negeri 1 Bukateja. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor dari siswa maupun faktor dari guru. Faktor dari siswa yaitu terdapat beberapa siswa yang memang sulit untuk diajak berdisiplin atau memang yang dari bawaannya sulit diatur/bandel, dari faktor guru yaitu kurangnya pengawasan dari guru Pendidikan Kewarganegaraan menyebabkan siswa banyak yang masih melakukan pelanggaran di sekolah. Dengan melihat fakta di lapangan, dapat diperjelas bahwa bagaimana peran guru

Pendidikan Kewarganegaraan dengan waktu hanya dua jam pelajaran dalam satu minggu ini dapat membentuk kedisiplinan siswa di SMA Negeri 1 Bukateja

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang “Peran Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Dalam Meningkatkan Karakter Kedisiplinan Peserta Didik SMA Negeri 1 Bukateja “. Penelitian ini memfokuskan pada peran guru PPKn dalam menegakkan kedisiplinan peserta didik kelas X. Kebiasaan baik ini nantinya dapat berdampak positif khususnya dalam kedisiplinan bagi peserta didik dalam menaati peraturan yang telah disepakati sekolah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian dan identifikasi masalah tersebut, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian yaitu “ Peran Guru Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Peserta Didik SMA Negeri 1 Bukateja”. Rumusan masalah tersebut dapat dirinci ke dalam beberapa pertanyaan untuk penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana peran guru PPKn dalam meningkatkan kedisiplinan peserta didik SMA Negeri 1 Bukateja?
2. Kendala apa yang dihadapi guru PPKn dalam meningkatkan kedisiplinan peserta didik di SMA Negeri 1 Bukateja?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi guru PPKn dalam meningkatkan kedisiplinan peserta didik ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berisi uraian tentang rumusan hasil yang akan dicapai oleh mahasiswa selaku peneliti yang merupakan jawaban terhadap pertanyaan mengapa penelitian ini dilakukan. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui peran guru PPKn dalam meningkatkan kedisiplinan peserta didik SMA Negeri 1 Bukateja.
2. Mengetahui kendala yang dihadapi guru PPKn dalam meningkatkan kedisiplinan peserta didik di SMA Negeri 1 Bukateja.
3. Mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi guru PPKn dalam meningkatkan kedisiplinan peserta didik SMA Negeri 1 Bukateja.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan bidang pendidikan khususnya di bidang Pendidikan Kewarganegaraan dalam pengembangan karakter disiplin.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti

Menambah ilmu pengetahuan sebagai hasil dari pengamatan langsung dalam memperdalam pemahaman penerapan disiplin ilmu yang diperoleh selama studi di perguruan tinggi khususnya bidang

ilmu PPKn. Serta menambah pengetahuan peneliti untuk melakukan penelitian selanjutnya.

b. Bagi Peserta Didik

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peserta didik dalam meningkatkan rasa kedisiplinan di lingkungan sekolah.

c. Bagi Orang Tua

Sebagai bahan pertimbangan untuk lebih meningkatkan kedisiplinan.

d. Bagi peneliti selanjutnya

Dapat digunakan sebagai referensi ilmiah dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan pendidikan karakter dalam pendidikan kewarganegaraan.